



# PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025



---

**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Rembang**

Jln. Pemuda Km. 2,5 Telp / Fax . (0295) 691738 Rembang

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, dalam Perubahan Renja Tahun 2025 ini memuat rencana dan tindakan strategis dalam pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berupa Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja beserta pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang muaranya pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa dokumen Perubahan Renja ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dan perbaikan penyusunan Renja yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tribulan I dan Capaian Renstra PD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dindikcapil .....	46
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025 .....	47
BAB IV PENUTUP.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Pada pasal 137 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Renja. Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut Persiapan penyusunan Renja OPD, Penyusunan rancangan Renja OPD, Pelaksanaan forum OPD dan Penetapan Renja OPD.

Rancangan Renja Perubahan OPD mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Renja Perubahan juga dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan awal OPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal OPD

Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selarasdengan Renstra OPD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi sebagaimana menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal OPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

11. SE Bupati Rembang nomor 000.7/0632/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Rembang

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang dan sekretariat agar tidak tumpang tindih (overlap) agar program, kegiatan berjalan selaras, seimbang dan berkesinambungan serta terciptanya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Untuk menselaraskan antara prioritas kegiatan pembangunan pada RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025 dengan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025.
2. untuk memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, dalam mencapai keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran kedepan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tugas pokok dan fungsinya guna peningkatan pelayanan serta kelancaran dalam melaksanakan program kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah :

- a. Acuan pelaksanaan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Rembang selama tahun 2025.
- c. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai kinerja pada masing-masing bidang.
- d. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan.
- e. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi
- f. Memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD. Dengan adanya lima hal tersebut di atas diharapkan target indikator output dan outcome dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2025, target dimaksud dapat tercapai, disamping itu Perubahan Rencana Kerja dapat dipakai sebagai bahan dalam penyusunan atau pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Bab I - **Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang yang menguraikan pengertian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, Proses penyusunan keterkaitan antar Perubahan Renja dengan Dokumen Perubahan RKPD, Renstra, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD. Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II - **Hasil valuasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan 1 Tahun 2025**. Dalam bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 1 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD.

Bab III - **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, yang didalamnya membahas masalah Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV - **Penutup**, Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TRIWULAN I TAHUN 2025**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

Berdasarkan review Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah :

“ Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk ”.

Dengan indikator tujuan :

“ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan ”.

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (dengan Indikator Sasaran : Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan)
- Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan (dengan Indikator Sasaran : Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan / Administrasi Kependudukan)

Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan dan Prosentese Efektifitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi kependudukan dengan target layanan sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang ber-KTP elektronik
2. Prosentase penduduk ber-Kartu Keluarga (KK)
3. Prosentase penduduk usia 0 s.d 18 th yang berakta kelahiran
4. Prosentase Penduduk Meninggal Dunia yang berakta Kematian.
5. Prosentase Pemanfaatan Data
6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tahun 2025 melaksanakan 4 Program dan 12 Kegiatan serta 26 Sub Kegiatan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik melalui monitoring dan evaluasi.

Dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 diperoleh progres sementara sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dengan hasil/keluaran yang direncanakan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang belum

terlaksana, di antaranya adalah sbb:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - c. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
  - d. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
  - e. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - f. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - g. Penyusunan Profil Kependudukan;
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat 2 (dua) Kegiatan, diantaranya adalah sbb :
- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (capaian kinerja sesuai target karena bersifat rutin)
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil, (dimana capaian tersebut dapat terbantu salah satu faktor adalah berfungsinya MPP dan akta kelahiran serta kematian merupakan target strategis yang harus selalu dimonitoring);
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan, diantaranya adalah sbb :
- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - e. Pengumpulan Data Kependudukan dan

Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;

4. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, target kinerja Program/Kegiatan diataranya adalah :
  - a. kegiatan tersebut memang diselenggarakan pada Triwulan I Tahun 2025;
  - b. target rasionalisasi dan efisiensi anggaran Tahun 2025;
  - c. berkurangnya mobilitas pindah datang penduduk pada Triwulan I Tahun 2025;
  - d. berkurangnya target pernikahan , perceraian dan status anak pada Triwulan I Tahun 2025;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan
  - a. Menurunnya prosentase kepemilikan dokumen Adminduk;
  - b. Menurunnya tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan adminduk;
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
  - a. Mempertahankan bahkan apabila dirasa mendesak menambah pada terget kegiatan yang dianggap strategis;
  - b. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran;
  - c. Memberdayakan dan meningkatkan SDM dan sarana serta prasarana yang ada.

Adapun rekapitulasi hasil dari Monitoring dan Evaluasi Renja sampai dengan triwulan I tersaji pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Rembang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) th 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Th 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d th berjalan			
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat daerah Tw I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Prog. dan Keg. s/d th berjalan Th 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	1	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP OPD DINDUKCAPIL	73,75	72,95	77,75	71,75	92,28%	75,36	95,46%

2	12	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev perangkat daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	3 Dok	1 Dok	33,33%	3 Dok	100,00%
						Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	4 Dok	4 Dok	3 Dok	1 Dok	33,33%	3 Dok	75,00%
2	12	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	12	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00%	3 Dok	100,00%

2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	12 Bln	12 Bln	3 Bln	25,00%	12 Bln	100,00%
2	12	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD yg dibuat	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	50,00%	2 Dok	100,00%
2	12	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	4 Lap	4 Lap	4 Lap	2 Lap	50,00%	4 Lap	100,00%
2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%

2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	2 Dok	50,00%	4 Dok	100,00%
2	12	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6 Dok	50,00%	12 Dok	100,00%

2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	30%	30,00%	50%	50,00%
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	33 Unit	18 Unit	54,55%	33 Unit	100,00%
2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	50%	50,00%	100%	100,00%
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	100%	30%	30,00%	100%	100,00%

2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	% Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	100%	100%	100%	50%	50,00%	100%	100,00%
						% Kepemilikan KIA	46%	61,96%	46%	62%	92,46%	46%	1000%
						% Kepemilikan KK	100%	100%	99,80%	94,05%	94,26%	100%	100%
						% kepemilikan KTP - El	100%	99,43%	100%	99,4%	62,50%	100%	100,00%
2	12	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cetak KIA	46%	61,96%	46%	62%	92,46%	46%	1000%
						Jumlah cetak KK	100%	100%	99,80%	94,05%	94,26%	100%	100%
						Jumlah cetak KTP elektronik	100%	99,43%	100%	99,4%	62,50%	100%	100,00%
2	12	2	02.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12000 lbr	12000 lbr	12000 lbr	2.482 lbr	20,68%	12000 lbr	100,00%
2	12	2	02.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk	24000 lbr	24000 lbr	24000 lbr	7910 lbr	65,92%	24000 lbr	100,00%
2	12	2	02.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa							



2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	96%	96%	96%	90%	93,75%	96%	100,00%
---	----	---	-------	---	--	---	-----	-----	-----	-----	--------	-----	---------

2	12	3	02.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Cetak Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak & Perubahan Status Kewarganegaraan	12480 lbr	12480 lbr	12480 lbr	75800 lbr	607,37%	12480 lbr	100,00%
2	12	3	02.02	5	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	4965 lbr	4965 lbr	4965 lbr	2000 lbr	40,28%	4965 lbr	100,00%
2	12	3	02.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	90%	90,00%	100%	100,00%
2	12	4			PROGRAM PENGELOLA-AN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	% Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	100%	100%	1005	50%	50%	100	100,00%
2	12	4	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data base yang valid	100%	100%	100%	22,7%	22,7%	100%	100,00%
2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 dok	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	2 dok	100%

2	12	4	02.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dok	2 dok	2 dok	0	0	100%	100%
2	12	4	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media sosialisasi yang digunakan	650000 org	650000 org	650000 org	646966 org	99,53%	646966 org	99,53%
2	12	4	02.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 macam	3 macam	3 macam	2 macam	75,00%	3 macam	100,00%
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	% Ketersediaan Data Kependudukan yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
2	12	4	02.04		Penyusunan profil	Jumlah Profil yang dibuat	100%	100%	100%	50%	50,00%	100%	100,00%
2	12	4	02.03	3	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	0	0	100%	100%

Pengukuran kinerja juga dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja. Capaian kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tahun 2025 s.d triwulan 1 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.  
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dindikcapil  
Kabupaten Rembang Triwulan 1 Tahun 2025

**Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dindikcapil Kab. Rembang  
Triwulan 1 Tahun 2025**

Kode	Usuran /Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Th 2025			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Keiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025					
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.874.866.501,-	755.906.331,-				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.874.866.501,-	755.906.331,-				
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.874.866.501,-	755.906.331,-				
1	2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	79,75 Angka	NA	NA	3.373.903.501	48,46%	
	2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen monev PD yang disusun	100%	30%	30%	5.046.000,00	0%
					Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang		100%				

	2	12	01	2.02	0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	30%	602..000,00		0%
--	---	----	----	------	------	---	---	-----------	-----------	-----	-------------	--	----

	2	12	01	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	888.500,00		%
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	33%	405.500,00		28,61%
	2	12	01	2.02	0008	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2 Laporan	40%	3.150.000,00	-	0,00%
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	100%	100%	100%	2.926.349.000,00	514.445.522,00	67,86%
	2	12	01	2.03	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	50%	2.779.509.000,00	500.335.522,00	26,67%
	2	12	01	2.03	0004	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen	8%	152.280,00	12.190.000,00	0,25%
	2	12	01	2.03	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	2 Laporan	50%	3.560.000,00	1.920.000,00	0,04%
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Daerah pada PD	100%	100%	100%	2.550.000,00		0,00%
	2	12	01	2.04	0007	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3 Laporan	30%	2.550.000,00		0,00%
	2	12	01	2.04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan manajemen kepegawaian	100%	0	0	0		0,00%

	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	30%	30%	164.097.001,00	48.445.517,00	0,17%
	2	12	01	2.07	0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50%	800.000,00	207.000,00	25%
	2	12	01	2.07	0004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50%	3.150.000,00	259.500,00	25%
	2	12	01	2.07	0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50%	32.000.000,00	596.000,00	0,02%
	2	12	01	2.07	0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	0	0,00	-	0,00%
	2	12	01	2.07	0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	50%	3.000.000,00	960.000,00	32%
	2	12	01	2.07	0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1 Laporan	50%	120.000.000,00	41.583.717,00	34,65%
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional yang dibeli Jumlah mebe lair yang dibeli Jumlah peralatan mesin dan komputer yang dibeli	15 unit 5 buah 8 unit	0	0	0,00	-	0,00%
	2	12	01	2.08	0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	0	0,00		

2	12	01	2.08	0007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	0	0,00		
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	225.700.000,00	76.146.213,00	23%
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	0	0,00	-	0,00%
2	12	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	24 Laporan	50%	120.000.000,00	23.185.483,00	19,32%
2	12	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan	50%	15.400.000,00	2.734.500,00	38,39%
2	12	01	2.09	0005	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	70%	105.700.000,00	52.960.730,00	50%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	100%	13%	13%	50.164.500,00	6.736.300,00	0,14%
2	12	01	2.10	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	6 Unit	21,55%	31.255.000,00	6.736.300,00	0,14,65%
2	12	01	2.10	0006	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0	0	0,00		
2	12	01	2.10	0007	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10 Unit	40%	20.000.000,00	4.583.500,00	22,92%

	2	12	01	2.10	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	2.304.000,00	2.115.500,00	91,82%
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	% Persentase Kepemilikan KTP-el % Kepemilikan KK % Kepemilikan KIA % Kepemilikan Dok. Pindah Datang	100 % 100 % 46 % 100 %	99,7 % 100 % 61 % 99 %	99,7 % 100 % 61 % 99 %	1.270.000.000,00	,00	40,99%
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cetak KIA Jumlah cetak KK Jumlah cetak KTP, KK, KIA	40 % 99,8 % 99,5 %	61 % 100 % 99,7 %	61 % 100 % 99,7 %	924.000.000,00	694.689.077,00	44,39%
	2	12	02	2.02	0003	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4800 Dokumen	1.200		0,00		
	2	12	02	2.02	0005	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	1 Laporan	50%	1.565.000.000,00	694.689.077,00	44,39%
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk	100%	100%	100%	196.000.000,00	24.757.900,00	0,51%
	2	12	02	2.04	0003	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15000 Dokumen	4.000		0,00		
	2	12	02	2.04	0004	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	1 Laporan	27%	196.000.000,00	24.757.900,00	0,51%
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta Bintek Operator SIAK yang mengikuti Bintek	30 orang	15 orang	20%	150.000.000,00	0,00	0,00%

	2	12	02	2.05	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	1 Laporan	50%	175.000.000,00	18.490.000,00	10,57%
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	% penerbitan akta kelahiran % penerbitan akta kematian % Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	100 % 70 % 98 %	50% 30% 50%	50% 50% 50%	58.000.000,00	0,00	%
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Cetak Akta Kelahiran Jumlah Cetak Akta Kematian	100 % 100 %		30%	46.500.000,00	9.145.000,00	0,19%
	2	12	03	2.02	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2 Dokumen	2 Dokumen	12%	36.000.000,00	9.145.000,00	0,19%
	2	12	03	2.02	0003	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	2 Layanan	20%	10.500.000,00	0,00	0,00%
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Cetak Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak & Perubahan Status Kewarganegaraan	100 %		50 %	11.500.000,00	3.925.200,00	34,13%
	2	12	03	2.03	0006	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	2 Dokumen			0,00		
	2	12	03	2.03	0007	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	1 Laporan	50%	11.500.000,00	3.925.200,00	34,13%

	2	12	03	2.03	0009	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan			0,00		
	2	12	03	2.03	0011	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	928 Orang			0,00		
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	% Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	100 %	60%	60%	172.960.000,00	,00	74,72%
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah database yang valid	100 %		60%	153.335.000,00	72.364.679,00	47,20%
	2	12	04	2.02	0002	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	137.360.000,00	72.364.679,00	52,68%
	2	12	04	2.02	0003	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen			16.975,00	0,00	0,00%
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media sosialisasi yang digunakan	100 %			16.125.000,00	0,00	0,00%
	2	12	04	2.04	0004	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan			0,00		

	2	12	04	2.04	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen			0,00		
	2	12	04	2.04	0006	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan			0,00		
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil supervisi Jumlah peserta Bimtek	2 dokumen 50 orang	3 dokumen 50 orang	100%	175.000.000,00	166.461.957,00	95,12%
	2	12	04	2.05	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	2 Dokumen			0,00		
	2	12	04	2.05	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100%	175.000.000,00	166.461.957,00	95,12%

5	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Profil yang dibuat	100 %			3.500.000,00	<b>0,00</b> -	0.00
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil yang dibuat	1 dokumen			3.500.000,00	0.00	0.00
	2	12	05	2.02	0003	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen			3.500.000,00	0.00	0,00%
J U M L A H										4.874.866.501,00	755.906.331,00	15,51%	

## **2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Pada dasarnya Kinerja Layanan Adminduk tidak mengalami gangguan berarti disaat keadaan Perekonomian di Kabupaten Rembang mengalami penurunan dan keterbatasan anggaran. Karena Dindukcapil sudah melakukan efisiensi baik dibidang anggaran maupun memaksimalkan SDM yang ada untuk sebisa mungkin mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Layanan Adminduk di Renstra 2021- 2026 (hingga periode triwulan I Renja Tahun 2025) Kinerja Layanan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dalam rician tabel 2.3

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dindukcapil

Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun 2025

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dindukcapil Kabupaten Rembang**  
**Triwulan I Tahun 2025**

No.	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tw. 1 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan			85	85	85	90,05	90,1	81,75	85	89,72	87	90,05	90,1	
2	Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan			85	87.50	90	93	96	100	85,58	95,42	85,15	96	97	
3	Presentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan / Administrasi Kependudukan			90	90	90	90	90	100	85	87,44	81,43	88	89	

## **2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

- 2.1.1 Tingkat kinerja pelayann OPD sampai dengan triwulan dua sejauh ini katagori tercapai namun ada beberapa catatan layanan yng harus ditingkatkan kinerjanya sebagai hasil dari monitoring dan evalasi diatas diataranya layanan Kinerja KIA, akta Kematian maupun percepatan proses sosialisasi bagi masyarakat dan bimtek petugas/operator terkait pencapaian IKD.
- 2.1.2 Permasalahan terkait rasionalisasi anggaran dan efisiensi sebagai akibat dari terget silpa anggaran transfer dari pusat dan PAD yang tidak memenuhi target rencana awal.
- 2.1.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah terhadap capaian Program Nasional/

Internasional yaitu terkait Standar Pelayanan Masyarakat yang indikatornya adalah indeks kepuasan masyarakat dimana hasil survey yang diterbitkan Dindukcapil Berdasarkan SKM Nilai IKM Tahun 2024 adalah 89,72.

2.1.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD :

- a) dari segi tantangan adalah bagaimana meyakinkan Yudikatif akan pentingnya suport anggaran untuk kemudahan dan Kepuasan masyarakat dibidang sarana dan prasarana.
- b) Dari segi peluang Adminduk adalah dokumen penting yang harus dimiliki setiap masyarakat agar tercapai 1 data

2.1.5 Formulasi isu-isu penting yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah :

- a) KTP, KK, KIA, Akta kelahiran dan kematian merupakan Program/Kegiatan Strategis yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
- b) Layanan Capil
- c) Data IKD

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Reviuew terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas

program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Pada Penganggaran Perubahan Tahun 2025, APBD di Kabupaten Rembang mengalami permasalahan anggaran yaitu dana transfer yang terlambat, silfa anggaran yang tidak sesuai rencana dan PAD yang tidak memenuhi target dampak dari pelemahan ekonomi. Permasalahan tersebut berpengaruh rencana pencairan anggaran pada Renja Tahun 2025 sehingga perlu adanya rasionalisasi dan efisiensi anggaran diseluruh OPD termasuk Dindukcapil Kabupaten Rembang. Terkait rasionalisasi dan efisiensi serta antisipasi segala kemungkinan yang berpengaruh pada kinerja OPD. Maka OPD harus melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran, berkenaan dengan hal tersebut Rasionalisasi efisiensi Perubahan Renja Tahun 2025 pada Dinas Anggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah melakukan rasionalisasi dan efisiensi Anggaran pada Perubahan Dindukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan rincian sbb:

1.	Anggaran Induk	Rp	4.874.866.501,-
2.	Anggaran Rasionalisasi	<u>Rp</u>	<u>626.171.200,-</u>
	Jumlah anggaran		

Perubahan **Rp 5.501.037.701,-**

Rasionalisasi dan Efisiensi anggaran Dindikcapil Kabupaten Rembang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 626.171.200,-. Penambahan anggaran tersebut berasal dari penambahan Anggaran pada pos Layanan Administrasi Kependudukan Pengadaan alat rekam dan printer KTP-el dan Gaji/tunjangan ASN sehingga Dindikcapil Kabupaten Rembang dalam Anggaran Perubahan Renja Dindikcapil Kabupaten Rembang Tahun 2025 total menjadi Rp. **5.501.037.701,-**

Tabel 2.4

Reviuew Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Rembang Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Loka	Jumlah								
				Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1			
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 737.610.000,00	Rp. 677.390.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.415.000.000,00	Rp. 395.000.000,00		
2	12	02	2,01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 471.000.000,00	Rp. 677.390.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.148.390.000,00	Rp. 155.000.000,00		

2	12	02	2,01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 471.000.000,00	Rp. 677.390.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.148.390.000,00	Rp. 155.000.000,00
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 162.610.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 162.610.000,00	Rp. 150.000.000,00
2	12	02	2,03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 162.610.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 162.610.000,00	Rp. 150.000.000,00
2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 104.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 104.000.000,00	Rp. 90.000.000,00
2	12	02	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 104.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 104.000.000,00	Rp. 90.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 43.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 58.000.000,00	Rp. 330.000.000,00
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 30.800.000,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 45.800.000,00	Rp. 270.000.000,00
2	12	03	2,01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.300.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.300.000,00	Rp. 160.000.000,00
2	12	03	2,01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.500.000,00	Rp. 110.000.000,00
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Rp. 12.200.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.200.000,00	Rp. 60.000.000,00

2	12	03	2,02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.200.000,00	Rp. 60.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 138.970.000,00	Rp. 28.390.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 167.360.000,00	Rp. 340.000.000,00
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 128.875.000,00	Rp. 28.390.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 157.265.000,00	Rp. 190.000.000,00
2	12	04	2,01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 115.235.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 135.235.000,00	Rp. 160.000.000,00
2	12	04	2,01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.640.000,00	Rp. 8.390.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.030.000,00	Rp. 30.000.000,00
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 10.095.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.095.000,00	Rp. 150.000.000,00
2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.095.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.095.000,00	Rp. 150.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp. 5.600.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.600.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan				Rp. 5.600.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.600.000,00	Rp. 40.000.000,00

2	12	05	2,01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.600.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 3.835.077.701,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.855.077.701,00	Rp. 4.745.000.000,00
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 7.496.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.496.000,00	Rp. 140.000.000,00
2	12	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 602.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 602.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	12	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 888.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 888.500,00	Rp. 20.000.000,00
2	12	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 405.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 405.500,00	Rp. 40.000.000,00
2	12	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.600.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.310.240.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.310.240.200,00	Rp. 3.135.000.000,00

2	12	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.156.040.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.156.040.200,00	Rp. 2.900.000.000,00
2	12	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 152.280.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 152.280.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	12	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.920.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.920.000,00	Rp. 35.000.000,00
2	12	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp. 924.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 924.100,00	Rp. 20.000.000,00
2	12	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 924.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 924.100,00	Rp. 20.000.000,00
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 110.596.901,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 130.596.901,00	Rp. 590.000.000,00
2	12	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
2	12	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.897.001,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 31.897.001,00	Rp. 135.000.000,00
2	12	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan,	Rp. 3.150.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.150.000,00	Rp. 35.000.000,00



2	12	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.171.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.171.000,00	Rp. 140.000.000,00
2	12	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.330.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.330.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	12	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.579.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.579.500,00	Rp. 65.000.000,00
<b>Jumlah</b>									<b>Rp. 4.760.257.701,00</b>	<b>Rp. 740.780.000,00</b>			<b>Rp. 5.501.037.701,00</b>	<b>Rp. 5.850.000.000,00</b>

Kab. Rembang, 26 Juni 2025

Pt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG  
Staf Ahli Bupati Rembang  
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik



*[Handwritten Signature]*  
**TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197006221990111001

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Dindukcapil**

##### 3.3.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindukcapil Kabupaten Rembang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Rembang Sejahtera”**.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam visi dan misi pertama RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Rembang Gemilang 2026”**

##### 3.3.2 Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan Dindukcapil Kabupaten Rembang maka ditetapkan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan, dengan indikator Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan / Administrasi Kependudukan.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  
Dindikcapil Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE (%)				
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	85	87	85	87.50	90	93	96
			- Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	90	90	90	90	90	90	90

### 3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

#### a. Faktor-Faktor/Pertimbangan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam menyusun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025, Dindikcapil Kabupten Rembang menggunakan pertimbangan dan berbagai faktor sebagai bahan kebijakan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 diantaranya :

1. Penyusunan Perubahan Renja 2025 tetap mempertahankan seluruh Program yang ada pada RPJMD 2021-2026 sebagai bentuk penjabaran

- pencapaian visi misi kepala daerah.
2. Penyusunan Perubahan Renja 2025 terjadi pada afistensi di masing-masing kegiatan layanan tanpa menghilangkan Kegiatan dan sub Kegiatan guna tetap mendukung pencapaian SPM sesuai target yang ada pada Renstra 2021-2026.
  3. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berupa penggeseran anggaran juga terjadi karena faktor Perencanaan APBD yang tidak sesuai dengan prediksi awal karena dampak penurunan ekonomi, yang juga berpengaruh pada APBD terkait dana transfer yang terlambat, silfa anggaran yang tidak sesuai rencana dan PAD yang tidak memenuhi target sehingga OPD hanya dapat melakukan Rasionalisasi dan efisiensi berupa penggeseran tanpa menambah anggaran sebagai dampak dari permasalahan tersebut.

**b. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada renja Perubahan Tahun 2025 tetap sama dengan anggaran induk Renja Tahun 2025, dengan 4 (Empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi dindukcapil kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- URUSAN UMUM / SEKRETARIAT  
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA
  1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- URUSAN TEKNIS / BIDANG

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLA INFORMASI ADMINISTRASI

1. Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**c. Kesesuaian Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Rancangan Perubahan RKPD.**

Dalam merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan tidak ada perubahan judul baik di program, kegiatan maupun sub kegiatan. Perubahan hanya terjadi pada berkurangnya pagu indikatif ke pagu Perubahan Renja sebagai akibat dari dampak melesetnya Perencanaan APBD yaitu terkait dana transfer yang terlambat, silfa anggaran yang tidak sesuai rencana dan PAD yang tidak memenuhi target.

Untuk memperjelas gambaran sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dibawah ini kami sajikan Rumusan Perubahan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dalam Tabel 3.2. sebagai berikut dibawah ini:

## Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan Dindukcapil Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja 2025		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>2.12.0.00.0.00.10.0000 - DINAS</b>													
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN					7.320.259.000	4.874.866.501	5.501.037.701			-	6.207.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.320.259.000	4.874.866.501	5.501.037.701			-	6.207.000.000	
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD								
						79,75	71,95	4.890.259.000	3.373.906.501	3.855.077.701		5.102.000.000	
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	120.000.000	5.046.000	7.496.000		140.000.000	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	602.000	602.000	PAD	40.000.000
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	888.500	888.500	PAD	20.000.000
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	405.500	405.500	PAD	40.000.000
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000	3.150.000	5.600.000	PAD	40.000.000
2	12	01	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat	100	100	3.086.622.000	2.926.349.000	3.310.240.200		3.135.000.000	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.876.622.000	2.770.509.000	3.156.040.200	DAU	2.900.000.000
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	190.000.000	152.280.000	152.280.000	PAD	200.000.000
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	3.560.000	1.920.000	PAD	35.000.000

2	12	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen laporan penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu	93	93	<b>15.000.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>924.100</b>			-	<b>20.000.000</b>
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	2.550.000	924.100	PAD			20.000.000
2	12	01	2.06		<b>Administrasi umum perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	100	<b>590.000.000</b>	<b>164.097.001</b>	<b>130.596.901</b>				<b>635.000.000</b>
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	800.000	1.000.000	PAD			30.000.000
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	130.000.000	5.147.001	31.897.001	PAD			135.000.000
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	2 Paket	25.000.000	3.150.000	3.150.000	PAD			35.000.000
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	75.000.000	32.000.000	31.549.900	PAD			85.000.000
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3.000.000	3.000.000	PAD			55.000.000
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	120.000.000	60.000.000	PAD			250.000.000
2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100	100	<b>588.945.000</b>	<b>225.700.000</b>	<b>354.740.000</b>				<b>625.000.000</b>
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	48 Laporan	170.400.000	120.000.000	107.400.000	PAD			185.000.000
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	410.545.000	105.700.000	247.340.000	PAD			430.000.000
2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD dengan kondisi baik	85	85	<b>229.692.000</b>	<b>50.164.500</b>	<b>51.080.500</b>				<b>252.000.000</b>
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	134.692.000	31.255.000	32.171.000	PAD			140.000.000
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	30.000.000	13.330.000	13.330.000	PAD			40.000.000
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000	5.579.500	5.579.500	PAD			65.000.000

2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	% Kepemilikan KTP-el % Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) % Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		100 100 62	100 100 62	<b>1.830.000.000</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>1.415.000.000</b>				<b>395.000.000</b>
2	12	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah Cetak KTP-el Jumlah Cetak KK Jumlah Cetak KIA		37.000 kpg 40.000 kpg 6.000 kpg	37.000 kpg 40.000 kpg 6.000 kpg	<b>1.550.000.000</b>	<b>924.000.000</b>	<b>1.148.390.000</b>				<b>155.000.000</b>
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2 Laporan	2 Laporan	1.550.000.000	924.000.000	1.148.390.000	PAD			155.000.000
2	12	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Penerbitan dokumen pindah datang penduduk		100	100	<b>100.000.000</b>	<b>196.000.000</b>	<b>162.610.000</b>				<b>150.000.000</b>
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi pendaftaran penduduk		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	196.000.000	162.610.000	PAD			150.000.000
2	12	02	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk		100	100	<b>180.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>104.000.000</b>				<b>90.000.000</b>
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk		2 Laporan	2 Laporan	180.000.000	150.000.000	104.000.000	PAD			90.000.000
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	% Penerbitan Akta Kelahiran % Penerbitan Akta Kematian		99,16 98,97	99,16 98,97	<b>300.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>				<b>330.000.000</b>
2	12	03	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah cetak akta kelahiran Jumlah cetak akta kematian		15.000 lembar 7.000 lembar	15.000 lembar 7.000 lembar	<b>250.000.000</b>	<b>46.500.000</b>	<b>45.800.000</b>				<b>270.000.000</b>
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa Penting		21.000 Dokumen	21.000 Dokumen	150.000.000	36.000.000	35.300.000	PAD			160.000.000
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		4 Layanan	4 Layanan	100.000.000	10.500.000	10.500.000	PAD			110.000.000
2	12	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	-%Penerbitan dokumen pengakuan anak -% Penerbitan dokumen pengangkatan anak -% dokumen akta perkawinan -% dokumen akta perceraian % pnerbitan dokumen		100	100	<b>50.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.200.000</b>				<b>60.000.000</b>
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	11.500.000	12.200.000	PAD			60.000.000

2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	%Ketersediaan Data Kependudukan yang dimutakhirkan		100 %	100 %	<b>270.000.000</b>	<b>169.460.000</b>	<b>167.360.000</b>				<b>340.000.000</b>
2	12	04	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Jumlah Database yang Valid		65.000 penduduk	65.000 penduduk	<b>170.000.000</b>	<b>153.335.000</b>	<b>157.265.000</b>				<b>190.000.000</b>
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan		3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	137.360.000	135.235.000	PAD			160.000.000
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	15.975.000	22.030.000	PAD			30.000.000
2	12	04	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	% Laporan Pengelolaan Informasi Adminduk Jumlah Media sosialisasi yang digunakan		100	100	<b>100.000.000</b>	<b>16.125.000</b>	<b>10.095.000</b>				<b>150.000.000</b>
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	16.125.000	10.095.000	PAD			150.000.000
2	12	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase elemen profil data kependudukan		100%	100 %	<b>30.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.600.000</b>				<b>40.000.000</b>
2	12	05	2.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	% Penyusunan Profil kependudukan		100	100	<b>30.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.600.000</b>				<b>40.000.000</b>
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	3.500.000	5.600.000	PAD			40.000.000

perbedaan antara pagu RKPD dengan pagu pada penetapan APBD Perubahan 2025 karena pada mekanisme rapat pembahasan dengan Komisi DPRD yang terdapat tambahan anggaran melalui pokok – pokok pikiran DPRD Kab.Rembang.

DATA POKIR 2025  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBNAG

NO	JUDUL	SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Pemenuhan Blangko KTP Elektronik	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	120.000.000	120.000.000	
2	Pengadaan Alat Rekam KTP-el		200.000.000	200.000.000	
3	Pengadaan Print KTP-el		120.000.000	120.000.000	
4	Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP bagi Lansia dan Disabilitas		100.000.000	100.000.000	
5	Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP bagi Lansia dan Disabilitas 2		100.000.000		Dihapus
6	Bimtek Terkait Pendaftaran Penduduk	Bimtek Terkait Pendaftaran Penduduk	150.000.000		Dihapus
7	Bimtek/Sosialisasi Pelayanan Online (Sipendukonline)	Pengolahan Data Kependudukan	90.000.000	90.000.000	
8	Pengadaan Alat Rekam dan Printer KTP	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		220.000.000	
			880.000.000	850.000.000	

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjalanan Perubahan Renja 2025 diantaranya :

- a. Terkait pergeseran (untuk efisiensi di mata anggaran makan, minum dan Perjalanan dinas) serta rasionalisasi anggaran dampak dari tidak tercapainya target Pendapatan APBD Tahun 2025. Maka Perubahan Renja Tahun 2025 yang merupakan hasil dari revisi ataupun pemutakhir berdampak pada nominal penggeseran anggaran maupun kualitas target kinerjanya, hal ini menjadi salah satu catatan penting untuk dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja maupun capaian serapan anggaran.
- b. Untuk mempercepat proses pencapaian kinerja dan anggaran yang belum tercapai dalam kesempatan pertama pasca penetapan Perubahan Renja Tahun 2025 akan di adakan rapat koordinasi antara Pejabat Struktural beserta seluruh pihak terkait untuk membahas percepatan capaian kinerja dan serapan anggaran agar mampu merealisasikan target yang telah

ditetapkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Semoga Perubahan Renja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang. Semoga kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang meningkat agar target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai. Sehingga upaya Perubahan Anggaran tahun 2025 tersebut dapat membawa manfaat dan hasil yang lebih baik dalam menunjang pembangunan Kabupaten Rembang.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini.

Rembang, 01 Juli 2025

Pit.KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG  
Staf Ahli Bupati Rembang  
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik



  
**TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197006221990111001